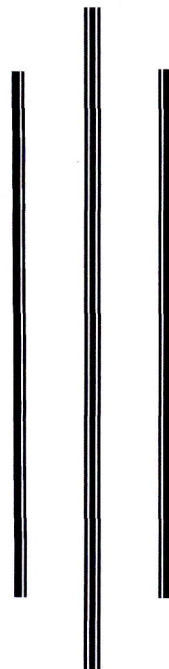




**RENCANA STRATEGIS
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020 - 2024**



Makassar, Oktober 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Nomor: Kep / 15 / X / 2022

tentang

REVISI RENCANA STRATEGIS
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL
TAHUN 2020 - 2024

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDASULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Biddokkes Polda Sulsel, maka disusun Revisi Rencana Strategis Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Biddokkes Polda Sulsel, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun .2019, tetang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga tahun 2020-2024;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
9. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1132/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: 1. Keputusan Kapolda Sulsel Nomor : Kep/551/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Kapusdokes Polri Nomor : Kep/44/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Pusdokes Polri Tahun 2020-2024;

3. Keputusan Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor : Kep/04/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULAWESI SELATAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2024.

1. revisi Rencana Strategis Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja/kegiatan masing-masing Ur/fungsi pada Biddokkes Polda Sulsel;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal 25 Oktober 2022

KABIDDOKKES POLDA SULAWESI SELATAN



dr. YUSUF MAWADI, M.M

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593

Kepada Yth.

1. Para Kasubbid Biddokkes Polda Sulsel
2. Kasubbag Renmin Biddokkes Polda Sulsel
3. Para Kaur Biddokkes Polda Sulsel
4. Kapolipol Biddokkes Polda Sulsel.

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kabid Dokkes Polda Sulsel Nomor : Kep/ 15 /X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Revisi Rencana Strategi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulsel Tahun 2020-2024.

BAB I.	PENDAHULUAN.....	2
1.	Kondisi Umum	2
2.	Potensi dan Permasalahan	2
a.	Potensi gangguan masyarakat.....	2
b.	Analisa SWOT.....	5
c.	Permasalahan	7
BAB II.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	14
1.	Visi Polda Sulsel.....	14
2.	Misi Polda Sulsel.....	14
3.	Tujuan Polda Sulsel.....	14
4.	Sasaran Strategis Polda Sulsel.....	14
5.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
6.	Penahapan Kebijakan Polda Sulsel.....	15
7.	Visi Biddokkes	16
8.	Misi Biddokkes	16
9.	Tujuan Biddokkes.....	17
10.	Sasaran Strategis Biddokkes.....	17
11.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
12.	Penahapan Kebijakan Biddokkes Polda Sulsel.....	18
BAB III.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
1.	Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel.....	20
2.	Arah Kebijakan dan Strategi Biddokkes Polda Sulsel	26
3.	Kerangka Regulasi Biddokkes Polda Sulsel.....	31
4.	Kerangka Kelembagaan Biddokkes Polda Sulsel	34
BAB IV.	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
1.	Target Kinerja	36
2.	Kerangka Pendanaan	37

BAB.V.....

BAB V. PENUTUP	40
1. Kaidah Pelaksanaan	40
2. Autentifikasi dan distribusi	40

LAMPIRAN:

- Matriks Kinerja Pendanaan Renstra Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2022-2024.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**REVISI RENCANA STRATEGIS
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL
TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan terkait arah suatu organisasi dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Bidang Kedokteran dan kesehatan (Biddokkes) Polda Sulawesi Selatan merupakan satuan unsur pendukung kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kapolda. Di mana dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Biddokkes Polda Sulsel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah antara lain:

- a. Biddokkes Polda Sulsel bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit dan poliklinik;
- b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biddokkes Polda Sulsel menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pembinaan kedokteran forensik, Identifikasi korban bencana (DVI) dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) Pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiil fasilitas kesehatan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian;
- 5) Pembinaan dan pelayanan kesehatan di Rumkit Bhayangkara dan Poliklinik di Jajaran Polda; dan
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.

Dalam rangka melayani *stakeholder*, Biddokkes Polda Sulsel Sulsel menjalankan tugas dan fungsinya yaitu bertugas membina fungsi kedokteran dan kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan Pelayanan Kesehatan serta Kesehatan Kesamaptaan di lingkungan Polri.

Sejalan dengan uraian diatas, maka berdasarkan kondisi empirik yang dinamis ada beberapa potensi permasalahan yang diduga bakal berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban nasional yang memerlukan telaah atau analisis komprehensif untuk dibahas pada bab ini.

2. Potensi dan permasalahan

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala global, regional dan nasional, seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi transportasi, timbulnya konflik dengan berbagai latar belakang kepentingan, perubahan iklim / *global warming*, epidemiologi penyakit, timbulnya pandemi *Covid-19* dan sebagainya dengan segala permasalahannya, mengakibatkan tugas yang dihadapi oleh Polri sebagai institusi, satuan dan fungsi serta perorangan akan kompleks dan berat.

Tuntutan dan harapan masyarakat serta upaya pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan Polri yang presisi, pelayanan publik yang berkualitas dan terselenggaranya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diselenggarakan dengan transformasi kultural dipadukan dengan penataan instrumental.....

instrumental dan struktural sebagai suatu proses berkelanjutan harus diwujudkan dengan komitmen yang kuat dan konsisten.

Mengingat kondisi tersebut maka tuntutan dan harapan Dokkes Polri di seluruh jajaran semakin meningkat dan kompleks untuk mewujudkan tugas operasional Dokkes Polri yang handal dan profesional sesuai kebutuhan tugas-tugas Polri serta mewujudkan personel dan satuan Polri yang sehat samapta dengan ditunjang masyarakat Polri yang sehat sejahtera.

a. Potensi Ancaman

- 1) Polri menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di bidang kamtibmas dan kamdagri, yang terkait dengan fungsi dan peran Dokkes antara lain :
 - a) Permasalahan Ideologi, politik, ekonomi , sosial budaya yang masih membelit masyarakat dan bangsa Indonesia menimbulkan berbagai macam gejolak dan konflik sosial dalam bentuk terorisme, tindakan anarkis dan situasi kontijensi serta gangguan keamanan yang meluas.
 - b) Semakin berkembangnya kejahatan terorisme, kejahatan konvensional serta kejahatan narkoba dengan modus operandi baru dan menggunakan teknologi tinggi serta berbagai upaya untuk menghilangkan barang bukti pada korban, sehingga sulit untuk di deteksi/diungkap, seperti pada kasus mutilasi.
 - c) Dampak globalisasi yang mendorong peningkatan kejahatan transnasional seperti perdagangan napza, peredaran illegal obat/makanan/minuman/kosmetika dan perdagangan orang.
 - d) Sulawesi Selatan secara geografis dan demografis sangat rawan terhadap ancaman bencana yang ditimbulkan oleh alam seperti tanah longsor dan banjir bandang maupun bencana yang terjadi karena perbuatan manusia seperti kecelakaan lalu lintas dan pencemaran/penrusakan lingkungan.
- 2) Munculnya berbagai masalah kesehatan dalam bentuk kejadian luar biasa, maupun masalah kesehatan yang bersifat pandemi dan epidemi seperti virus *Covid-19*, HIV/AIDS dan sebagainya serta penggunaan obat terlarang (Zat Adiktif seperti Narkoba), di samping menimbulkan masalah kesehatan.....

kesehatan bagi masyarakat juga terhadap kamtibmas. Jika timbul epidemi yang berkembang menjadi Pandemi (jumlah penderita meningkat dengan sangat cepat) maka akan terjadi situasi kedaruratan nasional.

- 3) Berbagai tantangan tugas yang semakin berat memerlukan postur personel Polri yang sehat samapta yaitu sehat secara holistik, tidak hanya bebas dari penyakit/kecatatan tetapi terdapat kondisi fisik, mental emosional, sosial dan lingkungan yang berfungsi harmonis serta mampu melaksanakan tugas bahkan pada saat tertentu melampaui beban normal dengan tidak mengalami kelelahanyang berarti.
- 4) Kebutuhan masyarakat Polri terhadap pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang merata dan berkualitas yaitu tersedia dan terjangkau, tepat kebutuhan, tepat sumber daya, tepat standar profesi/etika profesi, wajar dan aman. Sedangkan harapan pasien dan keluarga polri terhadap pelayanan Rumkit Bhayangkara adalah pelayanan yang memiliki *performance*, daya tanggap (*responsiveness*), kehandalan (*realibility*), jaminan (*assurance*) dan empati (*empathy*). Kondisi ini menuntut adanya pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Polda yang merata pada setiap satuan kewilayahan.
- 5) Berlakunya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang mengatur praktek dokter, khususnya dokter ahli/spesialis maksimal 3 (tiga) tempat praktek, mengakibatkan banyak Rumah Sakit Bhayangkara mengalami kesulitan mendapatkan dokter ahli tertentu, sedangkan persyaratan kemampuan pelayanan minimal harus tersedia dokter ahli dimaksud. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat Polri untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Selajutnya kondisi internal dan eksternal Dokkes Polri yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

b. Analisis SWOT

1) Kekuatan (Strengths)

- a) Adanya komitmen pimpinan Polri agar fungsi Dokkes berperan lebih besar pada tugas pembinaan dan operasional Polri dalam bentuk dukungan moril maupun nyata seperti rekrutment personel Polri (anggota Polri maupun PNS) selalu mendapatkan kuota untuk personel Dokkes dan pengembangan Faskes Polri karena semakin berperannya fungsi-fungsi Dokkes dalam berbagai kegiatan Polri di tingkat wilayah, nasional maupun internasional;
- b) SDM Biddokkes Polda Sulsel yang dikelola cukup besar dan sangat potensial untuk dikembangkan guna kontribusi optimal mendukung tugas-tugas Polri.
 - (1) Organisasi Dokkes tergelar dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres;
 - (2) Kebijakan pengelolaan pembiayaan yaitu regulasi, distribusi, pemanfaatan dan pengendaliannya untuk pelayanan dan dukungan kesehatan oleh Biddokkes Polda Sulsel dapat diupayakan memenuhi kebutuhan secara optimal;
 - (3) Piranti lunak sebagai pedoman manajemen dan operasional Biddokkes Polda Sulsel yang cukup lengkap untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kegiatan operasional yang terukur dengan indikator-indikator yang jelas, disertai sistem pengawasan, penilaian dan pembinaan yang berlanjut;
- c) Fungsi Dokpol (kedokteran kepolisian) telah semakin meningkat kemampuan dan kinerjanya, antara lain:
 - (1) Kinerja Dokpol dalam mendukung tugas Polri di bidang *Crime* maupun *Non Crime* semakin meningkat, khususnya *Disaster Victim Identification* (DVI) pada penanganan beberapa kasus Bom/Terrorisme, bencana/kecelakaan dengan korban massal telah mendapat pengakuan Nasional maupun Internasional;

(2) Rumkit.....

- (2) Rumkit Bhayangkara telah menyelenggarakan pelayanan kompartemen Dokpol seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *trafficking* serta perawatan tahanan dalam rangka penegakkan hukum dan HAM;
 - (3) Adanya tim Doksik mobile presisi Biddokkes yang siap 1 x 24 jam dalam penanganan olah TKP kasus-kasus tindak pidana di wilayah Polda Sulsel.
- d) Kemampuan dan kinerja fungsi pelayan kesehatan terus berkembang, antara lain:
- (1) Kemitraan yang sangat baik dengan berbagai institusi/lembaga untuk mengembangkan upaya promotif dan preventif penyakit-penyakit endemik dan epidemik seperti virus *Corona-19*, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain di bidang penyiapan sumber daya serta operasionalnya;
 - (2) Komitmen jajaran Dokkes Polda Sulsel sampai Kewilayahan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang dapat memenuhi harapan dan tuntutan *stake holders* dengan melakukan pengelolaan sumber daya kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan efisien;
 - (3) Pemenuhan persyaratan untuk akreditasi oleh Komisi Akreditasi FKTP di seluruh FKTP Polri, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan FKTP telah dilaksanakan secara berkelanjutan;
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kesamaptaan:
- (1) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pembentukan (Diktuk) dan pendidikan pengembangan (Dikbang) telah menunjukkan kinerja yang semakin bersih, transparan, akuntabel dan humanis didukung oleh SDM yang profesional, sistem dan metode yang cukup (*One day service*).
 - (2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan kesehatan promotif preventif Kesmapta di Lemdik dan satuan sudah semakin dipahami kepentingannya oleh *stake holders* serta kegiatannya semakin meningkat;

2) Kelemahan (Weakness)

- a) Sumber daya Dokkes Polda Sulsel masih belum memadai dihadapkan dengan tuntutan dan harapan :
 - (1) Fasilitas-fasilitas Dokkes Polda Sulsel di tingkat polda dan kewilayahan belum sepenuhnya memenuhi standarisasi sarana prasarana, peralatan dan tenaga. Tantangan dan tuntutan tugas yang dihadapi mengharuskan Dokkes Polda menyiapkan kemampuan yang memadai termasuk peralatan dengan teknologi modern;
 - (2) Adanya keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas personel dibandingkan dengan kebutuhan yang disesuaikan DSPP atau kebutuhan riil personel utamanya pada Sidokkes yang sejauh ini di awaki rata-rata 2-3 orang personel;
 - (3) Alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum semua fungsi dukungan kesehatan, pelayanan kesehatan dan operasional Dokkes Polda dapat didukung secara optimal, utamanya kepentingan akreditasi FKTP.
- b) Kemampuan Dokpol yang terstandarisasi sesuai level kemampuan belum cukup merata di tingkat kewilayahan dari Polda sampai Polres, padahal dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap saat tiba TKP. Kekuatan Dokpol yang meliputi fasilitas, peralatan, tenaga, sistem dan metode perlu dibangun dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- c) Masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumkit Bhayangkara akibat dari:
 - (1) Budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/ budaya pelayanan prima masih belum terbangun di Rumkit Bhayangkara;

(2) Terbatasnya.....

- (2) Terbatasnya personel baik secara kuantitas, kualitas maupun kualifikasi dibandingkan dengan kebutuhan tingkat kemampuan dan standar pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara;
- d) Cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan Polri bagi masyarakat Polri di seluruh wilayah sampai tingkat Polsek belum optimal karena:
 - (1) Keterbatasan fasilitas kesehatan Polri (Rumkit Bhayangkara tingkat III s.d. IV) dibandingkan dengan luas dan kondisi geografis tidak memadai;
 - (2) Tidak meratanya kemampuan Faskes Polri di beberapa poliklinik-poliklinik yang ada dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota dan keluarganya;
 - (3) Kemitraan dengan instansi kesehatan setempat khususnya Puskesmas di wilayah Polsek belum optimal dalam lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pemanfaatan sumber daya yang ada.
- e) Upaya pemeliharaan kondisi sehat samapta bagi personel Polri maupun satuannya belum optimal karena keterbatasan pada penganggaran yang belum menjangkau seluruh personel Polri;

3) Peluang (*Opportunities*)

- a) Reformasi disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk di institusi Polri terus berlangsung, merupakan momentum yang baik untuk melakukan perubahan budaya organisasi Dokkes Polri guna peningkatan kinerja;
- b) Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) keamanan yang dihadapi Polri pada berbagai situasi dan kasus sangat membutuhkan dukungan atau kontribusi nyata dari Dokkes Polri, misalnya pada terorisme, kriminal, narkoba, bencana dan operasi di daerah konflik;
- c) Kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik sebagai realisasi MOU dan bentuk kerjasama lain dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, membuka kesempatan Dokkes Polri untuk Dokkes.....

meningkatkan sumber daya dan kinerjanya. Misalnya: PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Korban *Trafficking* pada Rumkit Bhayangkara, Biddokkes Polda sebagai koordinator regional/daerah pada kegiatan DVI;

- d) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang kesehatan masyarakat mendorong peningkatan upaya pelayanan kesehatan sebagai hak dasar individu; Diberlakukannya Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan mendorong Poliklinik Polri untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai mitra dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan;
- e) Adanya tuntutan akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengharuskan setiap FKTP untuk mengakselerasi perbaikan dan peningkatan manajemen sumber daya dan pelayanannya sesuai dengan standar dan indikator pelayanan sehingga dapat semakin mewujudkan pelayanan prima;

4) Ancaman (*Threats*)

- a) Polri menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di bidang Kamtibmas dan Kamdagri, yang terkait dengan bidang Dokkes antara lain:
 - (1) Permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang masih membelit masyarakat dan bangsa Indonesia menimbulkan berbagai gejolak dan konflik sosial sampai ke tingkat anarkis dan situasi kontinjensi;
 - (2) Semakin berkembangnya kejahatan dengan modus operandi baru dan menggunakan teknologi tinggi yang menimbulkan kerugian besar dan sulit dideteksi/ diungkapkan;
 - (3) Pada saat ini, peredaran gelap produk, farmasi yang meliputi obat, makanan-minuman, kosmetika dan obat tradisional ilegal/palsu yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan telah tersebar.....

tersebar diseluruh Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Selatan;

- (4) Dampak globalisasi yang mendorong peningkatan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia/*trafficking*, pencurian kekayaan negara dan berbagai bentuk terorisme termasuk teror Nubika (*weapon of mass destruction*);
 - (5) Sulawesi Selatan secara geografis dan demografis sangat rawan terhadap ancaman bencana yang ditimbulkan oleh alam maupun perbuatan manusia, seperti gempa, tsunami, banjir bandang dan tanah longsor, kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara, kecelakaan/bencana di fasilitas publik serta pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b) Munculnya berbagai macam penyakit menular tertentu seperti HIV/AIDS, Rabies dan sebagainya di samping menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat juga berdampak terhadap Kamtibmas. Jika timbul epidemi yang berkembang menjadi pandemi (jumlah penderita meningkat dengan sangat cepat dan meluas) maka akan terjadi situasi kedaruratan nasional/ regional/ global.

Untuk menghadapi ancaman semacam ini, Polri umumnya, Biddokkes pada khususnya, beserta unsur terkait (Kemenkes, TNI, dll) harus siap menanggulangi pada masyarakat Polri maupun masyarakat umumnya. Di samping itu anggota Polri dan keluarganya termasuk kelompok rentan terjangkit sejumlah penyakit menular tertentu (HIV/AIDS, Hepatitis) baik sehubungan dengan penugasan maupun perilaku yang beresiko tinggi;

Di samping itu anggota Polri dan keluarganya termasuk kelompok rentan terjangkit sejumlah penyakit menular tertentu (HIV/AIDS, Hepatitis) baik sehubungan dengan penugasannya maupun perilaku yang beresiko tinggi;

- c) Keadaan umum kebutuhan masyarakat Polri terhadap pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang merata dan berkualitas yaitu tersedia dan terjangkau, tepat kebutuhan, tepat sumber daya, tepat standar.....

standar profesi/etika profesi, wajar dan aman. Sedangkan harapan pasien dan keluarga Polri terhadap pelayanan di Rumkit Bhayangkara dan FKTP Polri adalah pelayanan yang memiliki *performance*, daya tanggap (*responsiveness*), kehandalan (*realibility*), jaminan (*assurance*) dan empati (*empathy*);

- d) Berbagai tantangan tugas yang semakin berat memerlukan postur personel Polri yang sehat dan samapta, yaitu sehat secara holistik, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan tetapi terdapat kondisi fisik, mental emosional, sosial dan lingkungan yang berfungsi harmonis serta mampu melaksanakan tugas bahkan pada saat tertentu melampaui beban normal dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti.

Adanya transisi epidemiologi yang menyebabkan pergeseran pola penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, sejalan dengan gaya hidup modern yang cenderung merubah pola makan dan kebiasaan hidup, juga sangat mempengaruhi kondisi sehat samapta personel Polri.

c. Permasalahan

Dengan mencermati kondisi umum dan hasil analisis dengan pendekatan SWOT maka permasalahan yang teridentifikasi, adalah:

- 1) Pengembang SOTK Dokkes pada satuan kewilayah utamanya Polres/Polresta tidak di ikuti dengan peningkatan SDM, sarpras dan personel yang memadai, antara lain :
 - a) Belum tersedianya Rumkit Bhayangkara TK.III dan TK.IV pada satuan wilayah sebagai penyangga pelayanan kesehatan untuk Pegawai Negeri pada Polri dan masyarakat umum.
 - b) Keterbatasan secara kuantitas dan kualitas personel kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan utamanya pada Sidokkes Polres di mana DSP 6-8 orang sedangkan jumlah rillnya 2-3 orang;
 - c) Alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum semua fungsi dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.

2) Belum.....

- 2) Belum meratanya kekuatan Dokpol yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelayanan dan kemampuan kedokteran kepolisian di tingkat kewilayahan dari Polda sampai Polres, padahal dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap saat di TKP. Kekuatan Dokpol yang meliputi fasilitas, peralatan, sistem dan metode perlu dibangun dari tingkat pusat sampai kewilayahan serta sumber daya manusia perlu dikembangkan berdasarkan metode *local boy for local job*, sehingga SDM yang telah mengikuti Dikbangspes Dokpol dari kewilayahan tidak berpindah/mutasi ke daerah lain yang menyebabkan personel yang telah mengikuti Dikbangspes Dokpol tetap berada di wilayahnya masing-masing.
- 3) Semakin meningkatnya ancaman penyakit menular tertentu yang sangat berdampak luas seperti HIV/AIDS, termasuk di masyarakat Polri, sehingga pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kesamaptaan personel/satuan Polri serta derajat kesehatan masyarakat Polri seharusnya lebih mengutamakan upaya pemeliharaan dan pencegahan (Promotif dan preventif) yang dilaksanakan fungsi Yankes dan Kesmapta, akan tetapi pengembangan kemampuan dan pengalokasian sumber daya yang ada pada bidang ini masih kurang memadai;
- 4) Peran fungsi Kesmapta dalam siklus manajemen SDM Polri dari rekrutmen, pendidikan, penugasan, pemeliharaan dan pengakhiran tugas melalui kegiatan rikkes seleksi, rikkes berkala dan kesehatan preventif kesmapta belum dapat diselenggarakan secara komprehensif;
- 5) Semakin meningkatnya ancaman dari peredaran gelap produk farmasi yang meliputi (obat, makanan-minuman, kosmetika dan obat tradisional) yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menimbulkan kematian, namun demikian peran fungsi Farmasi Kepolisian di Biddokkes Polda sampai dengan tingkat Polres masih belum dapat diselenggarakan dengan baik;
- 6) Masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumkit Bhayangkara akibat dari :
 - a) Budaya.....

- a) Budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/ budaya pelayanan prima masih belum terbangun di seluruh Rumkit Bhayangkara;
 - b) Terbatasnya personel baik secara kuantitas, kualitas maupun kualifikasi dibandingkan dengan kebutuhan tingkat kemampuan dan standar pelayanan kesehatan pada seluruh Rumkit Bhayangkara;
- 7) Cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan Polri bagi masyarakat Polri di seluruh wilayah sampai tingkat Polsek belum optimal karena:
- a) Keterbatasan fasilitas kesehatan Polri (Rumkit Tingkat III s/d IV) dibandingkan dengan luas dan kondisi geografis tidak memadai;
 - b) Tidak meratanya kemampuan fasilitas kesehatan Polri di beberapa Poliklinik/FKTP yang ada dalam memberikan layanan kesehatan kepada Anggota dan keluarganya.
- 8) Kemitraan dengan instansi kesehatan setempat khususnya Puskesmas di wilayah Polsek belum optimal dalam lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pemanfaatan sumber daya yang ada.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi Polda Sulsel :

“Terwujudnya Sulawesi Selatan yang aman dan tertib”.

Makna : Terwujudnya Sulawesi Selatan yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong:.

2. Misi Polda Sulsel :

“ Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat”.

Makna : Melindungi, Mengayomi dan melayani masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

3. Tujuan Polda Sulsel :

- a. Menjamin Terpeliharanya keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Seluruh Daerah Sulawesi Selatan;
- b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. Modernisasi Pelayanan Polri di Polda Sulawesi Selatan;
- d. Mewujudkan Polri yang Profesional;
- e. Menerapkan Manajemen Polri di Polda Sulsel yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis Polda Sulsel

Mengacu kepada Sasaran *Impact* (SI) yaitu “ Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di daerah Sulawesi Selatan “, maka sasaran strategis Polda Sulsel tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Penegakkan hokum secara berkeadilan;
- c. Terwujudnya profesional SDM Polda Sulsel;
- d. Modernisasi teknologi Polda Sulsel;
- e. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan yang bersih, terbuka dan melayani;

5. Hubungan keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya kamtibmas di seluruh wilayah Provinsi Sulsel	1. Pemeliharaan kamtibmas di wilayah Provinsi Sulsel
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan.	2. Penegakkan hukum secara berkeadilan.
3. Mewujudkan Polri yang profesional	3. Profesionalisme SDM Polda Sulsel
4. Modernisasi pelayanan Polri pada Polda Sulsel	4. Modernisasi Teknologi Polda Sulsel
5. Menerapkan manajemen Polri pada Polda Sulsel yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan Provinsi Sulsel yang bersih terbuka dan melayani

6. Penahapan Kebijakan Polda Sulsel

a. Tahapan 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima dan melalui peningkatan SDM untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Sulsel yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahapan 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri Polda Sulsel yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatasus Polri yang modern;

c. Tahapan 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri Polda Sulsel yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahapan 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri Polda Sulsel yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar

lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahapan 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri Polda Sulsel yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecakupan kesejahteraan personel Polri;

7. Visi Biddokkes Polda Sulsel

Untuk mewujudkan fungsi dan peran Dokkes Polri di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian (pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan) yang dibutuhkan tugas operasional maupun pembinaan Polri harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi serta mampu menjawab tantangan dan ancaman kedepan sesuai perkembangan lingkungan strategis, maka Biddokkes Polda Sulsel merumuskan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian yang Presisi “

8. Misi Biddokkes Polda Sulsel

“ Menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri serta pelayanan kesehatan kepolisian yang profesional, terpercaya dan terintegrasi”.

Untuk memotivasi personel Dokkes Polri guna keberhasilan terwujudnya Misi Biddokkes Polda Sulsel maka ditetapkan Tagline Biddokkes Polda Sulsel: **Profesional, Terpercaya dan Terintegrasi.**

Makna Tagline **“Profesional, Terpercaya dan Terintegrasi”** sebagai berikut :

a. **Profesional**, mempunyai arti :

- 1) Mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi profesi sesuai dengan sop dan peraturan yang berlaku;
- 2) Setiap insan dokkes polri mampu meningkatkan kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik melalui pendidikan formal maupun non formal;

b. Terpercaya.....

- b. **Terpercaya**, mempunyai arti :
 - 1) Mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat polri dan umum dalam pelayanan kespol dan dokpol;
 - 2) Mampu memenuhi standar akreditasi layanan sampai tingkat paripurna untuk seluruh fasyankes milik polri;
- c. **Terintegrasi**, mempunyai arti :
 - 1) Mampu menyatukan sistem informasi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan polri mulai dari pusat sampai kewilayahan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 2) Mampu membangun kolaborasi sistem informasi kesehatan dengan satuan kerja lainnya dilingkungan polri;
 - 3) Mampu membangun networking sistem informasi kesehatan polri dengan instansi eksternal;

9. Tujuan Biddokkes Polda Sulsel

- a. Mewujudkan Dokkes Polri yang Profesional di Polda Sulsel;
- b. Modernisasi Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian;
- c. Menerapkan Manajemen Dokkes Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya;
- d. Pembangunan Rumkit Bhayangkara Tk. IV sebagai penyangga Rumkit Bhayangkara Tk. II Ujung Pandang.

10. Sasaran Strategis Biddokkes

Mengacu kepada Sasaran *Impact* (SI) yaitu “ Layanan Kedokteran dan Kesehatan Polri yang Presisi “, maka sasaran strategis Biddokkes Polda Sulsel tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai kebutuhan di Polda Sulsel;
- b. Terselenggaranya pelayan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di tingkat Polda, kewilayahan dan lemdiklat Polri serta jajarannya;
- c. Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian;
- d. Terwujudnya SDM Biddokkes Polda yang profesional;
- e. Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi;
- f. Tersedianya data daan informasi yang handal dan user friendly;
- g. Terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*;

h. Terkelolanya.....

- h. Terkelolanya anggaran yang akuntabel;
- i. Pengawasan dan pengendalian yang Efektif;

11. Hubungan keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Mewujudkan Dokkes Polri yang Profesional di Polda Sulsel;	Terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai kebutuhan di Polda Sulsel
	Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian
	Terwujudnya SDM Dokkes yang profesional
2.Modernisasi pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian.	Meningkatnya pemenuhan Sarpras berbasis teknologi dan informasi
	Tersedianya data dan informasi yang handal dan user friendly;
3.Menerapkan manajemen Dokkes Polri yang terintegrasi dan terpercaya	Terwujudnya good governance dan clean government;
	Terkelolanya anggaran yang akuntabel;
	Pengawasan dan pengendalian yang Efektif;
4.Pembangunan Rumkit Bhayangkara Tk.IV	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di tingkat Polda, kewilayahan dan lemdiklat Polri serta jajarannya;
	Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dan masyarakat umum.

12. Penahapan Kebijakan Biddokkes Polda Sulsel

a. Tahapan 2020

Melanjutkan pelayanan Dokkes Polri yang Prima melalui peningkatan SDM guna mewujudkan masyarakat Polri yang sehat Samapta;

b. Tahapan 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan Dokkes Polri yang Prima dengan didukung oleh sistem metode yang berbasis IT;

c.Tahapan.....

c. Tahapan 2022

Memantapkan kualitas pelayanan Dokkes Polri yang Presisi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan berintegritas;

d. Tahapan 2023

Memantapkan kualitas pelayanan Dokkes Polri Presisi, yang berorientasi pada ketersediaan fasilitas kesehatan Polri yang berkualitas guna meningkatkan kesehatan dan kepercayaan masyarakat Polri dan bekerjasama dengan instansi terkait;

e. Tahapan 2024

Terwujudnya peningkatan layanan Dokkes Polri yang Presisi kepada masyarakat Polri sampai wilayah terjauh;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel

a Sasaran strategis **“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kehadiran Polri pada Lokasi Prioritas (Lokpri) pelintasan antar Provinsi;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada lokasi perlintasan Provinsi;
 - b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perlintasan Provinsi baik di darat maupun laut.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (*Janji Presiden*)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
 - e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob.

3) peningkatan.....

- 3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyiapkan kegiatan operasi , meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara dimana Provinsi Sulawesi Selatan adalah wilayah penyangga Ibu Kota Negara;
- 4) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
 - c) meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan NKRI.
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda;
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership*.....

- c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “**keadilan restoratif** serta peran **mediasi**” dalam setiap konflik di masyarakat
- 7) melaksanakan “Efektifitas operasional” kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas.
 - c) penguatan sistem informasi Polri pada Polda Sulsel berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda;
 - (3) pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan hukum secara berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) peningkatan pengungkapan empat jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan.....

- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) mengusulkan sertifikasi bagi penyidik Polri pada Polda Sulsel guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
 - c) mendukung peningkatan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*)
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
 - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
 - f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
 - g) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI).
- 2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda dan aparat penegak hukum;
 - b) standardisasi data kriminal nasional.
- 3) Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 4) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b) melanjutkan.....

- b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif*” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)
- c. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM Polda Sulsel**” dicapai dengan arah kebijakan, yaitu peningkatan kualitas SDM Polda Sulsel.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM. (*Janji Presiden*)
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, yaitu modernisasi Sarana dan Prasarana Polri pada Polda Sulsel.
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b) membangun smart security di Polda Sulawesi Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara Baru;
 - c) membangun Big Data/Single Data Entry Polri.
 - d) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri;
 - e) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri.
- e. Sasaran strategis “**Sistem Pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) melaksanakan.....

- 1) melaksanakan “Layanan publik Polri yang prima pada Polda Sulawesi Selatan”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
- b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
- c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

- 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (Janji Presiden)
- b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.

- 3) melaksanakan “Akuntabilitas pengelolaan anggaran”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri Pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:

- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan review anggaran Polri.
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) menyusun.....

- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
 - (2) menyusun LKIP Polri;
- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik;
(*Janji Presiden*)

2. Arah Kebijakan dan Strategi Biddokkes Polda Sulsel

- a. Sasaran Strategis “**Terwujudnya Pembinaan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian sesuai kebutuhan di Polda Sulsel**”, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

 - a) Menyempurnakan dan melengkapi piranti lunak / SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Mensosialisasikan pilun / SOP

2) peningkatan.....

- 2) Peningkatan peran aktif fungsi Dokpol dalam pembinaan kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah:

- a) Melaksanakan *workshop* / Rakernis;
 - b) Melaksanakan sosialisasi dan pengenalan tupoksi bidang dokkes (DVI, DNA, Ortodontologi Kepolisian, deteksi dini narkoba dan Keslap) bagi Bhabinkamtibmas;
 - c) Pelatihan Dokpol bagi pelajar
- b. Sasaran Strategis **“Terselenggaranya pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di tingkat Polda, kewilayahan dan lemdiklat Polri serta jajarannya”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan jumlah Rumkit Bhayangkara, peningkatan pelayanan FKTP serta peningkatan status/klasifikasi Rumkit Bhayangkara TK.II Ujung Pandang;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a) Pembangunan dan pembentukan Rumkit Bhayangkara TK.IV di Polda Sulsel;
 - b) Meningkatkan pelayanan FKTP secara paripurna terhadap personil polri dan keluarganya dengan melaksanakan renovasi bangunan FKTP sesuai standar Akreditasi BPJS;
 - c) Peningkatan status/klasifikasi Rumkit Bhayangkara TK.II Ujung Pandang menjadi Rumkit Bhayangkara TK.I
- 2) Pelayanan FKTP dan Rumkit Bhayangkara sesuai standar;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
- a) Menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi tertinggi;
 - b) Melaksanakan Bimtek persiapan akreditasi FKTP dan Rumkit Bhayangkara;

c) Meningkatkan.....

- c) Meningkatkan pelayanan di FKTP dan Rumkit Bhayangkara secara paripurna;
- 3) Peningkatan jumlah personel polri yang melaksanakan rikkes berkala;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a) Melaksanakan rikkes berkala setiap tahun;
 - b) Meningkatkan target dan cakupan kegiatan rikkes berkala;
 - c) Menindak lanjuti hasil rikkes berkala.
- c. Sasaran strategis **“Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya proses identifikasi korban bencana secara scientific;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Mengintegrasikan antemorten data base;
 - b) Berkoordinasi dengan stakeholder/unsur terkait;
 - 2) Peningkatan pelaksanaan kegiatan Keskamtibmas di tingkat Polda dan jajaran Kewilayahan;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Analisa dan evaluasi kegiatan Keskamtibmas kewilayahan guna monitoring dalam bentuk laporan Rikkes Berkala;
 - b) Bekerja sama dengan instansi Polri dan / atau luar Polri;
 - 3) Peningkatan cakupan pelaksanaan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan Giat Deteksi Dini Narkoba di wilayah (monitoring laporan kegiatan);
 - b) Meningkatkan pelaksanaan giat Deteksi Dini Narkoba;
 - 4) Peningkatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Rumkit Bhayangkara;

Untuk.....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan kemampuan Faskes Polri sebagai sarana rehabilitasi;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi sesuai standar;
- c) Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder;
- d) Melakukan bimbingan teknis rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh subbid dokpol;

5) Peningkatan pelayanan kedokteran forensik sesuai standar;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan jumlah dan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- b) Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder;

d. Sasaran strategis **“Terwujudnya SDM Biddokkes yang profesional”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan kemampuan SDM Biddokkes Polda Sulsel;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Dokkes Sesuai kebutuhan;

2) Pemenuhan jumlah personel Biddokkes Polda Sulsel sesuai dengan kualifikasinya;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) Membuat rencana kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya;
- b) Upaya pemenuhan SDM Biddokkes sesuai kualifikasinya;

3) Peningkatan kualitas SDM Biddokkes dan FKTP jajaran;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :

- a) Melakukan updating data SDM Dokkes;

b) melaksanakan.....

- b) Melaksanakan Dikjur Dokpol;
 - c) Meningkatkan realisasi jabatan fungsional bagi PNS;
 - d) Merealisasikan standar kompetensi SDM Dokkes;
 - e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Dokkes di kewilayahan.
- e. Sasaran strategis **“Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi pada Dokkes Polda dan jajaran;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Menginventarisir dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - b) Membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan Polri seperti pembangunan / renovasi FKTP dan faskes lainnya;
 - c) Pemenuhan dan modernisasi sarpras (Matfaskes. Almatsus dan aplikasi) secara bertahap;
 - d) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan;
- f. Sasaran strategis **“Tersedianya data dan informasi yang handal dan user friendly”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Aplikasi Rikkesla;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Melaksanakan sosialisasi Aplikasi Rikkesla;
 - b) Melakukan pembaharuan system Aplikasi Rikkesla;
- g. Sasaran strategis **“Terwujudnya *good governance & clean goverment*”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Reformasi kelembagaan dan Birokrasi Dokkes Polda;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah :
 - a) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Dokkes yang andal;
 - b) membangun.....

- b) Membangun system yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) Meningkatkan manajemen kinerja Dokkes Polda dan jajaran;
 - d) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Dokkes Polda dan jajaran;
- h. Sasaran Strategis “**Terkelolanya anggaran yang akuntabel**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Penguatan akuntabilitas kinerja Dokkes Polda;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a) Peningkatan nilai IKPA Biddokkes Polda Sulsel;
- i. Sasaran Strategis “ **pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dokpol dan Kespel ;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan supervisi Bidang Kesehatan;
 - b) Melaksanakan Monev penyerapan anggaran Pelayanan Kesehatan.

3. Kerangka Regulasi Biddokkes Polda Sulsel

Kerangka regulasi pada Renstra Biddokkes Polda Sulsel berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Biddokkes yang bersifat mengikat kepada personil Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undang yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun kedepan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Biddokkes Polda Sulsel tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap/Perkasatfung yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Biddokkes Polda Sulsel dan juga rencana penghapusan Perkap/Perkasatfung yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan dengan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat

berupa.....

berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1.	Kep Kapolri Nomor : Kep/719/XI/2010 tentang tata cara pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan/ penugasan khusus Polri	Perlu direvisi untuk menyesuaikan perkembangan terkini dalam bentuk Perkap	Urkesmapta	SDM Polda Sulsel	Tahun 2023 Penyusunan revisi lampiran Kep Kapolri Nomor : Kep/719/XI/2010 tentang tata cara pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan/ penugasan khusus Polri
2.	Perkap tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Poliklinik di Lingkungan Biddokkes	Belum ada aturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Poliklinik di Lingkungan Biddokkes	Uryankes		Tahun 2023 Penyusunan Perkap tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Poliklinik di Lingkungan Biddokkes
3.	Perkap tentang Sistem Rujukan terpadu pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes	Belum ada aturan tentang Sistem Rujukan terpadu pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes	Uryankes		Tahun 2023 penyusunan Perkap tentang Sistem Rujukan terpadu pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes

4. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan organisasi Biddokkes Polda Sulsel yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Biddokkes Polda Sulsel yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Biddokkes Polda Sulsel mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil Negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polri di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengaturan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Biddokkes Polda Sulsel dalam rangka terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai kebutuhan, terselenggaranya pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, kuratif dan Rehabilitatif di tingkat pusat, kewilayahan dan Lemdiklat Polri serta jajarannya, serta terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian.

Penguatan kelembagaan Biddokkes Polda Sulsel juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Biddokkes Polda Sulsel yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlakudi lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d. penerapan.....

- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran Negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Biddokkes Polda Sulsel sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif, preventif dan rehabilitative di tingkat polda, kewilayahan dan Lemdiklat Polri serta jajaran, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV di Jajaran Polda Sulsel;
- Penambahan ruang perawatan Rumkit Bhayangkara TK.II Ujung Pandang
- Peningkatan jumlah FKTP yang terakreditasi;

Dari arah bijak dan strategi pembangunan bidang pelayanan kesehatan tersebut, untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Pusdokkes Polri, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut :

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di tingkat Polda, kewilayahan dan lemdiklat Polri serta jajarannya;	Pembangunan Rumkit Bhayangkara TK.IV	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri						
			5062 Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri						
			1) Jumlah pembangunan Rumkit Bhayangkara Tk.IV	Makassar Palopo Bone Bantaeng Pare-pare	-	-	-	3 RSB TK.IV	2 RSB TK.IV

2	Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi	Pembangunan dan renovasi FKTP jajaran Polda Sulsel	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri						
			5062 Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri						
			1) Jumlah FKTP yang di renovasi / dibangun	Seluruh FKTP Polda Sulsel dan jajaran	7 FKTP	7 FKTP	5 FKTP	-	-
			2) Jumlah FKTP yang terakreditasi	31 FKTP	-	-	3 FKTP	8 FKTP	10 FKTP

BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****1. Target Kinerja**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Biddokkes Polda Sulsel tahun 2020-2024 sesuai indikator kinerja yang telah ditentukan maka dibuat target kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Base line	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IK UTAMA										
Stakeholder										
SI	Meningkatnya layanan kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel	IKU1	Tingkat kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel	74	74	75	76	77	78	
IK PENUNJANG										
Internal Process										
SS1	Terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	IKP1	Presentase pelaksanaan kegiatan pembinaan Dokpol dan Kesepol	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SS2	Terselenggaranya kesehatan promotif, preventive, kuratif dan rehabilitative ditingkat Polda, Lemdik dan kewilayahan	IKP2	Jumlah pembangunan Rumkit Bhayangkara TK.IV	0%	0%	0%	0%	3 RSB	2 RSB	
		IKP3	Presentase Akreditasi FKTP Polri	0%	0%	0%	20%	30%	50%	
		IKP4	Presentase IKM pada FKTP dan RS. Bhayangkara Makassar	81%	81%	82%	83%	84%	85%	
		IKP5	Presentase pegawai pada Polri yang melaksanakan Rikkes	32%	32%	34%	70%	75%	80%	
SS3	Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian	IKP6	Presentase penyelesaian VER	90%	90%	90%	95%	95%	95%	
		IKP7	Presentase Pelayanan Keskamtibmas	83%	83%	84%	84%	85%	85%	

Learning and growth									
SS4	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana berbasis TI	IKP8	Jumlah FKTP Polri yang ditingkatkan dan dikembangkan sarprasnya	5 unit	7 unit	7 unit	5 unit	-	-
SS5	Terwujudnya SDM Polri yang kompeten	IKP9	Jumlah personel yang mengikuti Dikjur/Pelatihan	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org
SS6	Terkelolanya anggaran yang akuntabel	IKP10	Nilai kinerja anggaran Biddokkes (Nilai IKPA)	97	97,95	98	98,05	98,10	98,15
SS7	Tersedianya data dan informasi yang handal dan user friendly	IKP11	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi	100	100	100	100	100	100
SS8	Terwujudnya good governance dan clean government	IKP12	Nilai AKIP Biddokkes	95	95	95	95	95	95
SS9	Pengawasan pengendalian yang efektif	IKP13	Nilai monev pelayanan dokkes	95	95	95	95	95	95

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah diterapkan beberapa Program di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Profesionalisme SDM Polri;
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sasaran Prasarana Polri;
- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. Program Dukungan Manajemen;

2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran Strategis Biddokkes Polda Sulsel yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dokkes Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk operasional Biddokkes Polri dan pemenuhan fasilitas dan peralatan kesehatan dan peningkatan profesionalisme Dokkes Polri. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari rupiah murni, juga dipenuhi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pinjaman Dalam Negeri dan pinjaman Luar Negeri.

KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Ket
1	Terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	1) Menyempurnakan dan melengkapi piranti lunak/ SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2) Mensosialisasikan piranti lunak / SOP.	PM	
2	Terselenggaranya kesehatan promotif, preventive, kuratif dan rehabilitative ditingkat Polda, Lemdik dan kewilayahan	1) Pembangunan dan pembentukan Rumkit Bhayangkara TK.IV 2) Menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi tertinggi 3) Melaksanakan Bimtek persiapan akreditasi FKTP 4) Melaksanakan Rikkes Berkala setiap tahun 5) Meningkatkan target dan cakupan rikkes berkala 6) Menindak lanjuti hasil rikkes berkala	RM PNBP	
3	Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian	1) Mengintegrasikan antemorten database 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait 3) Meningkatkan kemampuan faskes Polri 4) Meningkatkan jumlah dan jenis pelayanan sesuai kebutuhan	RM	
4	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana berbasis TI	1) Menginventarisir dan merencanakan kebutuhan sesuai sarana prasarana 2) Membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan Polri seperti pembangunan dan renovasi FKTP / Poliklinik.	PNBP	

		3) Pemenuhan dan modernisasi sarpras 4) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan		
5	Terwujudnya SDM Polri yang kompeten	1) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Dokkes sesuai kebutuhan 2) Pemenuhan SDM Dokkes sesuai kualifikasi 3) Melaksanakan Dikjur	RM	
6	Terkelolanya anggran yang akuntabel.	1) Peningkatan Nilai IKPA Biddokkes Polda Sulsel	RM	
7	Tersedianya data dan informasi yang handal dan user friendly	1) Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Rikkes Berkala 2) Melakukan pembaruan system Aplikasi Berkala	PM	
8	Terwujudnya good governance dan clean government	1) Meningkatkan manajemen kinerja Dokkes Polri 2) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Dokkes Polri	RM	
9	Pengawasan pengendalian yang efektif	1) Melaksanakan supervisi bidang kesehatan 2) Melaksanakan monev penyerapan anggaran	RM	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biddokkes Polda Sulawesi Selatan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Fungsi / Ur dan personel Polri Biddokkes Polda Sulsel sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional serta derajat kesehatan personel Polri dapat terpelihara khususnya di Polda Sulawesi Selatan.

1. Kaidah pelaksanaan

- a. Dengan komitmen seluruh jajaran Dokkes Polri di semua level terus berupaya mewujudkan postur Dokkes Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan transparansi berkeadilan);
- b. Membangun kemitraan secara sinergis dengan lembaga/fungsi/komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi misi Biddokkes Polda Sulsel yang bermanfaat bagi Polri dan masyarakat;
- c. Pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, humanis, tidak diskriminatif dan etis;
- d. Kegiatan operasional Dokkes Polri yang dilaksanakan Biddokkes Polda Sulsel pada prinsipnya terprogram secara rinci pada RKA-K/L dan DIPA Biddokkes Polda Sulsel setiap tahunnya, serta dilaksanakan berdasarkan arahan dan perintah dari pimpinan Polri guna mengurangi dan mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan pelaksanaannya.

2. Autentifikasi dan distribusi

- a. Autentifikasi, Renstra Biddokkes Polda Sulsel merupakan jabaran dari Renstra Polda Sulsel, Renstra Pusdokkes Polri dan disahkan oleh Kabid

Dokkes.....

Dokkes sebagai pimpinan Biddokkes Polda Sulsel sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran;

- b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Ur / Fungsi Biddokkes Polda Sulsel untuk dipedomani dan dijabarkan ke dalam rencana tahunan untuk pencapaian *output* dan *outcome*.

Demikianlah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Biddokkes Polda Sulsel tahun 2020-2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Biddokkes Polda Sulsel.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal: 25 Oktober 2022

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN


di YUSUF MAWADI, M.M
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN BIDDOKKES POLDA SULSEL
TAHUN 2022 S/D 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET			ALOKASI (RIBUAN RUPIAH)				KET
				2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	PROFESIONALISME SDM POLRI										
		Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional									
3107	Pengendalian Pegawai Polri										
		Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri									
		a. Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun di daerah		447	447	447					
		b. Jumlah personel Polri yang mengikuti Pendidikan Pengembangan		126	126	126					
2	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI						2.267.469	17.380.842	28.249.885	RM/ PNB	
		Terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta layanan internal									
3084	Pengembangan Peralatan Polri										
		Penyelenggaraan kegiatan pengadaan; pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan					623.564	654.742	687.479	PNBP	
		persentase penambahan Almatrus Polri dibandingkan tahun sebelumnya		70%	80%	100%					
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras						597.216	15.627.077	26.408.431	RM / PNB	
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras						(PEMB. 3 RSB)	(PEMB. 2 RSB)		
		Jumlah Layanan perkantoran Sarpras		12bln	12bln	12bln					
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri						1.046.689	1.099.023	1.153.975	PNBP	
		Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri									
		Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya		75%	85%	100%					
3	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT						127.750	128.100	128.100	RM	
		Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan									

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET			ALOKASI (RIBUAN RUPIAH)			KET
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masy.									
		Terseleenggaranya dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat								
		Rata-rata jumlah paket pelayanan pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		127.750	128.100	128.100	RM
4	DUKUNGAN MANAJEMEN									
		Terselenggaranya dukungan manajemen kepada Internal Polri yang memenuhi standar pelayanan					22.363.213	23.481.374	24.655.442	RM / PNPB
3072	Pelayanan Kesehatan Polri									
		Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel / Keluarga Polri					12.949.253	13.596.716	14.276.551	RM / PNPB
		a. Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi personel dan keluarga Polri		75%	75%	75%				
		b. Kegiatan Promotif dan Preventif		5	5	5				
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri									
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal								
		Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri	12 bin	12 bin	12 bin	12 bin				
	RUPIAH MURNI						20.687.052	36.625.909	48.361.342	
	PNBP						5.860.536	6.153.563	6.461.241	
	BADAN LAYANAN UMUM						0	0	0	0
	PINJAMAN LUAR NEGERI						0	0	0	0
	PINJAMAN DALAM NEGERI						0	0	0	0
	RUPIAH MURNI PENDAMPING						0	0	0	0
	JUMLAH						26.547.588	42.779.472	54.822.583	

